

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah. Dalam pelaksanaan pemungutannya, umumnya dilakukan dengan mendatangi kantor samsat setempat dan mobil samsat keliling. Kantor samsat biasanya berjarak jauh untuk beberapa desa dikarenakan hanya terdapat 1 kantor untuk tiap kabupaten/kota. Hal ini menyebabkan banyak warga desa yang jauh dari kantor samsat kesulitan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kondisi ini dapat mengakibatkan penerimaan PKB menjadi kurang optimal.

Kesulitan penduduk desa untuk melakukan pembayaran PKB di kantor samsat semakin meningkat di masa pandemic Covid-19 yang sudah 2 tahun ini mewabah di Indonesia. Hal ini akibat dari mobilitas warga dan pelayanan tatap muka yang dibatasi. Selain itu, menurunnya volume kegiatan ekonomi membuat kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar merupakan wajib pajak kendaraan

bermotor cenderung menurun dan tidak stabil. Kondisi ekonomi yang tidak stabil ini berpotensi membuat warga lebih memprioritaskan pendapatan mereka untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam kondisi Covid-19 ini yang melemahkan sendi-sendi perekonomian rakyat, pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan salah satunya pengoptimalan potensi penerimaan pajak. Pajak kendaraan bermotor yang merupakan bagian dari pajak daerah diyakini memiliki potensi yang besar sebagai salah satu penyumbang PAD. Terhitung hingga 31 Desember 2018, terdapat potensi penerimaan PKB Provinsi Lampung dari tunggakan PKB sebesar Rp1,297 triliun dari 1.964.925 unit kendaraan bermotor yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Salah satu faktor penyebab kondisi ini yaitu masih banyak warga yang menunggak pajak kendaraan bermotor karena pelayanan yang belum bisa memudahkan dan menjangkau semua warga di desa-desa yang jauh dari kantor samsat, tak terkecuali warga Desa Tulusrejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Selama ini pembayaran PKB warga desa Tulusrejo hanya mengandalkan dari pelayanan kantor samsat di pusat kota dan pelayanan samsat keliling.

Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lampung Timur menurut laman djpk.kemenkeu.go.id mengalami penurunan di 2020 menjadi 60,59 M dengan tingkat realisasi 90,30% dari sebelumnya di tahun 2019 sebesar 62,33 M dengan tingkat realisasi 109,38%. Hal ini berbanding lurus dengan menurunnya persentase realisasi PAD dari di 2019 sebesar 105,87% menjadi 102,93% di 2020. Untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah khususnya dari pembayaran pajak

kendaraan bermotor tentu diperlukan inovasi-inovasi yang bisa meningkatkan pelayanan sampai ke pelosok daerah agar memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu Bapenda Provinsi Lampung, bekerja sama dengan Polda Lampung, Jasa Raharja, dan Bank Lampung, berupaya meningkatkan kepatuhan warga dalam membayar pajak daerah, termasuk dengan menyediakan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di badan usaha milik desa (BUMDes), salah satunya di BUMDes Tulus Wahana Sentosa, Desa Tulusrejo, Kabupaten Lampung Timur. Ini akan memberikan kemudahan kepada masyarakat wajib pajak, dan dengan adanya kemudahan ini diharapkan membuat partisipasi masyarakat untuk membayar PKB bisa mengalami peningkatan. Dengan kemudahan tersebut, masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) tidak perlu datang ke samsat induk yang ada di pusat kota.

BUMDes dapat melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor setelah terintegrasi dengan sistem Samsat Desa elektronik (e-Samdes). Selain itu warga yang belum bisa membayar full dapat melakukan sistem cicil selama waktu yang telah ditentukan BUMDes. Ini dapat memudahkan warga yang belum memiliki uang untuk membayar pajak secara sekaligus dan sudah jatuh tempo atau yang sedang menunggu masa panen.

Program ini merupakan hal yang sangat menarik bagi penulis sehingga ingin mengetahui bagaimana pencatatan akuntansi dan sistematika dari penerimaan pajak kendaraan bermotor baik dari penerimaan pajaknya saja maupun bunga yang didapat dari sistem cicil yang diberlakukan. Selain itu penulis juga tertarik mengetahui apa dampak positif dari penerapan program ini bagi Desa Tulusrejo.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses bisnis jasa layanan pembayaran PKB oleh BUMDes?
2. Bagaimana akuntansi pendapatan jasa layanan pembayaran PKB?
3. Bagaimana dampak pemberian jasa layanan pembayaran PKB terhadap tingkat kepatuhan pembayaran PKB di Desa Tulusrejo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana proses bisnis jasa layanan pembayaran PKB oleh BUMDes.
2. Dapat menjelaskan penerapan akuntansi pendapatan jasa layanan pembayaran PKB oleh BUMDes.
3. Mengetahui dampak pemberian jasa layanan pembayaran PKB terhadap tingkat kepatuhan pembayaran PKB di Desa Tulusrejo.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penelitian akan dilakukan di BUMDes Tulus Wahana Sentosa di Jl. Pertanian, Desa Tulusrejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dan kantor desa Tulusrejo. Penelitian akan lebih di spesifikkan mengenai pencatatan akuntansi dan sistematika dari diberlakukannya program pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun 2021 di BUMDes Tulus Wahana Sentosa dan dampaknya terhadap ketaatan pembayaran PKB di Desa Tulusrejo. Penulis juga akan menggunakan beberapa data terkait di tahun 2020 sebagai pembanding.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Memberikan informasi dan pengetahuan baru bagi penulis mengenai pencatatan akuntansi dan pengklasifikasian pendapatan jasa layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) serta sistematika pemungutannya oleh BUMDes Tulus Wahana Sentosa Desa Tulusrejo sebagai sarana pengembangan ilmu.
2. Memberikan gambaran terkait akuntansi, sistematika dan dampak dari pemberlakuan program pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di BUMDes Tulus Wahana Sentosa Desa Tulusrejo kepada pembaca dan penulis selanjutnya sebagai referensi untuk pengembangan teori dan bahan rujuk tambahan.
3. Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Desa Tulusrejo, Bapenda Provinsi Lampung serta pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan bahan pengembangan dalam penerapan ilmu akuntansi untuk pendapatan pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB). Tak kalah penting diharapkan dampak yang ditimbulkan dari penerapan program ini dapat menjadi evaluasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk menambah BUMDes-BUMDes lain yang belum menerapkan program ini untuk segera menerapkannya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, hal yang akan dibahas penulis adalah mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori, penulis akan menjabarkan mengenai landasan-landasan teori yang penulis jadikan pedoman untuk menulis Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab metode dan pembahasan, penulis akan menjelaskan metode yang digunakan. Penulis juga akan membahas dan menjabarkan terkait bahasan yang telah penulis teliti. Hasil tinjauan terkait akuntansi dan sistematika program pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun 2021 di BUMDes Tulus Wahana Sentosa dan dampaknya terhadap ketaatan pembayaran PKB di Desa Tulusrejo akan banyak dibahas pada bab ini.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab simpulan akan penulis isi dengan rangkuman dan simpulan dari apa yang telah dibahas dan diteliti.